

# PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA SERTA POLEMIKNYA DENGAN SOEKARNO

Sri Pajriah<sup>1</sup>

*Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Galuh Ciamis*

*Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46274 Jawa Barat*

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama dan Negara serta Polemiknya dengan Soekarno”. Tulisan ini berawal dari keinginan sebagian umat Islam era sekarang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mempunyai landasan historis yang cukup panjang sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang paling awal menyuarakan secara terbuka bahwa Islam layak untuk dijadikan dasar negara. Adapun tujuan tulisan ini pertama, untuk memaparkan pemikiran Mohammad Natsir tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara serta bagaimana ia menyanggah argumentasi pemikiran Soekarno yang menganut paham pemisahan agama dan negara. Kedua, latar belakang kehidupan Mohammad Natsir serta setting sosial politik yang mempengaruhi pola pikir Mohammad Natsir mengenai hubungan agama dan negara. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Metode ini mencakup empat tahapan kegiatan, yaitu *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber tertulis), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Mohammad Natsir menganut paham kesatuan agama dan negara yang merupakan lawan dari sekularisasi. Dalam melaksanakan hukum Islam perintahnya cukup jelas baik dalam Al-Qur`an maupun hadis. Negara bagi Natsir bukan tujuan, tetapi sebatas alat untuk melaksanakan hukum Islam yang merupakan keharusan bagi setiap penganut Islam sebagai konsekwensi dari keimanannya dan syahadatnya.

**Kata Kunci:** Pemikiran Moh. Natsir, agama dan negara, dan polemik

## ABSTRACT

*This paper is entitled "Mohammad Natsir's Thought About Religion and State Relationship With His Polemic with Soekarno". This paper begins with the desire of some Muslims of the present era to make Islam as the basis of a country that has a fairly long history base since the beginning of independence in 1945. Mohammad Natsir is one of the earliest Islamic figures Indonesia voiced openly is Islam worthy to be the basis of the country . As the purpose of this first paper, to expose Mohammad Natsir's thoughts about the relationship between religion (Islam) and the state as well as how to hum the arguments of Sukarno's thought of embracing religion and state. Second, the background of Mohammad Natsir's life as well as the sociopolitical setting of Mohammad Natsir's growing mindset regarding the relationship of religion and state. The method used in this paper is. This method includes four stages of activity, namely heuristics (search and written source conclusion), source criticism, interpretation, and historiography. The results of this paper show that Mohammad Natsir adheres to the unity of religion and state which is the opposite of secularization. In carrying out Islamic law his command is quite clear in both the Qur'an and the hadith. The country for Natsir is not an end in itself, but a tool to enforce Islamic law which is a means for every adherent of Islam as a consequence of his faith and his creed.*

**Keywords:** Thought Moh. Natsir, religion and state, and polemic

---

<sup>1</sup> Penulis Koresponden  
E-mail address: sripajriah@yahoo.co.id  
doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v4i2.910>

## PENDAHULUAN

Sampai sekarang, masih ada umat Islam Indonesia yang tetap memperjuangkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia dengan berbagai bentuk gerakan. Bentuk gerakan mereka ada yang terang-terangan dengan kekuatan senjata seperti yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, Umar Patek dan sebagainya yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah, tetapi ada juga yang melalui gerakan dakwah seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan jargonnya *Khilafah* dan *Syari`ah*. Belum lama ini juga ramai diberitakan munculnya gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah 9 yang berpusat di Pesantren Az-Zaitun Indramayu dengan pimpinan Abu Toto Abdussalam atau Syech AS. Panji Gumilang (Al Chaidar, 2000: 85).

Kemunculan kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia pada era tahun 2000-an di atas tidak terlepas dari gerakan serupa yang terjadi era tahun 50-an, yaitu ketika pada tanggal 7 Agustus 1949 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) (Al Chaidar, 2000: 7). Negara Islam Indonesia diproklamkan di daerah yang dikuasai oleh Tentara Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke Jogja. Sebab daerah de-facto R.I. pada saat itu hanya terdiri dari Yogyakarta dan kurang lebih 7 Kabupaten saja (menurut fakta-fakta perundingan /kompromis dengan Kerajaan Belanda; perjanjian Linggarjati tahun 1947 hasilnya de-facto R.I. tinggal pulau Jawa dan Madura, sedang perjanjian Renville pada tahun 1948, de-facto R.I. adalah hanya terdiri dari Yogyakarta). Seluruh kepulauan Indonesia termasuk Jawa Barat kesemuanya masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda.

Sebelum Proklamasi NII oleh SM Kartosoewirjo tahun 1949, pada awal kemerdekaan tahun 1945 ada usaha juga dari kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Usaha itu terjadi pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha kemerdekaan Indonesia). BPUPKI merupakan panitia yang dibentuk pemerintah Jepang untuk mempersiapkan rancangan konstitusi yang akan dipakai dalam Negara Indonesia yang akan dimerdekakan oleh Jepang (Mahfud MD, 1993: 30). Menurut Hatta, perdebatan tajam antara golongan yang menghendaki Negara Islam dan

golongan yang menghendaki negara bebas dari pengaruh agama (nasionalisme) terjadi pada sidang hari ketiga (Hatta, 1982: 435). Salah satu tokoh Islam yang menyuarakan dasar Negara Islam adalah Ki Bagoes Hadikoesomo. Akibat tidak adanya kesepakatan pada sidang pertama BPUPKI tentang dasar negara yang akan dipakai, maka dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang terdiri atas wakil golongan Islam dan golongan nasionalis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 akhirnya mencapai *modus vivendi* (kesepakatan luhur) dalam bentuk kompromis antara golongan Islam dan nasionalis, artinya keinginan kedua pihak ditampung dalam suatu piagam yang disebut Piagam Jakarta (Mahfud MD, 1993: 44).

Dari uraian di atas terlihat bahwa keinginan sebagian umat Islam era sekarang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mempunyai landasan historis yang cukup panjang sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Bahkan menurut Mahfud MD (1993: 4), perdebatan pada sidang BPUPKI antara kelompok Islam dan nasionalis tersebut merupakan kelanjutan dari perdebatan sebelumnya pada tahun 1940-an dimana pada tahun tersebut terjadi perdebatan sengit antara Mohammad Natsir mewakili kelompok Islam dengan Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis.

Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia yang paling awal menyuarakan secara terbuka bahwa Islam layak untuk dijadikan dasar negara. Walaupun perdebatannya dengan Soekarno berputar pada wacana hubungan agama dan negara dan belum berbicara dasar negara, namun materi polemik mereka sudah menampilkan masalah-masalah yang sama dengan materi yang dibahas dalam perdebatan BPUPKI dan Konstituante mengenai dasar negara. Karena itu, kajian terhadap pemikiran Natsir tentang hubungan agama dan negara menarik untuk dilakukan. Sebab pemikiran inilah yang mewarnai gerakan-gerakan kelompok Islam selanjutnya yang menginginkan Islam sebagai dasar negara atau bahkan menginginkan berdirinya Negara Islam.

Dengan studi litelatur, karya ilmiah ini akan mengelaborasi pemikiran Natsir tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara serta bagaimana ia menyanggah argumentasi pemikiran Soekarno yang menganut paham pemisahan agama dan negara. Dalam karya ilmiah ini juga dibahas latar belakang (*back*

ground) kehidupan Natsir serta setting sosial politik yang mempengaruhi pola pikir Natsir mengenai hubungan agama dan negara.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode sejarah, yaitu suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. (Louis Gottschalk, 1985: 32) Metode ini bertumpu pada empat kegiatan pokok, sebagai berikut:

1. Heuristik, yaitu tahapan pengumpulan data atau menghimpun bukti-bukti sejarah yang relevan dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan dua metode, yaitu: Studi kepustakaan dan wawancara.
  - a. Studi kepustakaan  
Dilakukan karena ditemukannya sumber-sumber tertulis yang memberikan informasi seputar LDII, baik berupa buku, majalah, koran, SK. Pemerintah, dokumen-dokumen resmi LDII, kitab-kitab pegangan LDII dan hasil-hasil MUBES LDII.
  - b. Wawancara  
Untuk melengkapi data dokumen di atas, penulis mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh dan para pengikut LDII, tokoh-tokoh masyarakat Serta lembaga-lembaga yang sudah mengkaji masalah LDII.
2. Kritik, yaitu data yang telah didapat, diuji atau dinilai baik secara intern ataupun ekstern untuk menemukan validitas dan kredibilitasnya, sehingga secara otomatis akan terpisah mana data yang layak untuk di-pakai dan mana data yang harus diting-galkan.
3. Interpretasi, yaitu tahap menafsirkan (eks-planasi) dan menganalisis data yang sudah diyakini validitas dan kredibilitasnya, sehingga memiliki pengertian yang jelas. Akhirnya bisa dipahami makna sebenarnya yang terkandung di dalam data tersebut.
4. Hiatoriografi, yaitu tahap menyajikan sintesis baru berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai, kemudian disusun secara sis-tematis dalam sebuah karya tulis, sehingga memunculkan suatu tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. (Sartono Kartodirjo, 1992: 123) Dalam prosedur penulisannya, penulis berusaha untuk memaparkan secara kronologis, dan di dalam penyajiannya ditampilkan sesuai dengan tema-tema pokok yang menjadi objek penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Riwayat Hidup Mohammad Natsir

Tanah Minangkabau pada permulaan abad ke-20, dikenal sebagai salah satu daerah pelopor gerakan pembaharuan di Indonesia. Daerah ini turut melahirkan beberapa tokoh besar, baik dalam bidang keagamaan, intelektual, kesusastraan, pendidikan, maupun politik Indonesia. Beberapa nama yang dapat disebutkan, antara lain Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Natsir, dan Buya Hamka.

Di ranah Minangkabau yang masyarakatnya dikenal kuat memegang dan menjalankan syariat Islam itulah Mohammad Natsir dilahirkan pada 17 Juli 1908. Dia dilahirkan di Kampung Jembatan Berukir di kota kecil nan sejuk bernama Alahan Panjang. Kota ini sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Ayahnya, Idris Sutan Saripado, adalah seorang juru tulis kontrolir, sedangkan ibunya, Khadijah, berasal dari keturunan Chaniago. Sebagaimana masyarakat Minang lainnya, keluarga Idris ini pun merupakan keluarga Muslim yang taat. (Dzulfikridin, 2010: 19).

Ketika berusia 8 tahun, Natsir mulai sekolah di *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* Adabiyah Padang, sebuah sekolah partikelir yang dipimpin oleh H. Abdullh Ahmad. Hal itu disebabkan Natsir tidak diterima di sekolah pemerintah, yang khusus bagi anak-anak pegawai pemerintah, seperti demang dan wedana. Di Padang ini, Natsir tinggal bersama makciknya yang bernama Rahim.

Hanya beberapa bulan Natsir bersekolah di HIS Adabiyah itu, dia dipindahkan oleh ayahnya ke HIS pemerintah di Solok yang baru dibuka. Di sana, natsir tinggal bersama keluarga Haji Musa, seorang saudagar yang dermawan. Ketika di Solok itulah, dasar agama Natsir dibentuk dan dibina. Pagi hari dia belajar di HIS, lalu belajar di Madrasah Diniyah pada sore hari, kemudian belajar mengaji Al-Qur`an dan ilmu agama Islam lainnya pada malam hari. Di Solok itupun, Natsir tidak bertahan lama. Tiga tahun kemudian, dia dipindahkan ke HIS Padang yang empat tahun sebelumnya pernah menolaknya karena diajak kakaknya Rabi`ah untuk tinggal bersamanya (Yusuf Abdullah, 1978: 5-6).

Setelah tamat dari HIS pada 1923, Natsir melanjutkan pendidikannya ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* setingkat SLTP

sekarang di Padang. Ketika di Mulo itu, dia belajar main biola. Di samping itu, dia masuk pandu *National Islamische Padvindrij (Natipij)*, bagian dari perkumpulan *Jong Islamieten Bond (JIB)* cabang Padang. Karena nilai Natsir selalu baik, bahkan terbaik, dia mendapatkan beasiswa sebesar dua puluh rupiah setiap bulan dari pemerintah Belanda (Dewan Redaksi, 1993: 21). Beasiswa per bulan itu terus diterimanya sampai tamat MULO pada 1927.

Setamat dari MULO, Natsir melanjutkan sekolahnya ke *Algemeene Middelbare School (AMS)* di Bandung. Untuk itu, dia harus berlayar jauh mengarungi lautan meninggalkan tanah kelahirannya. Pada Juli 1927, sewaktu dia berusia 19 tahun, mulailah Natsir belajar di AMS. Ketika belajar di AMS itu, Natsir aktif menjadi anggota JIB cabang Bandung, bahkan terpilih menjadi ketuanya sejak 1928 sampai 1932. Di JIB, Natsir berkenalan dengan Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Mohammad Roem, dan lain-lain (yang kelak menjadi teman seperjuangannya di Masyumi). Saat itu pula, dia berkenalan dengan Noer Nahar, seorang pemuda yang kemudian menjadi istrinya, sewaktu gadis itu menjadi anggota JIB bagian putri. Di JIB itu pula, Natsir bertemu dengan beberapa tokoh gerakan politik, seperti Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Syaikh Ahmad Syurkati yang sering memberikan pengajaran dan menjadi tempat bertanya pada anggota JIB. Di samping itu, Natsir berkenalan dan banyak belajar dari Ustad Ahmad Hassan, seorang ulama yang dikenal berpaham radikal dan tokoh utama organisasi Persatuan Islam (Persis) (Damanhuri, 1994: 3). Keempat orang terakhir itulah yang banyak memengaruhi alam pikiran intelektual dan keagamaan Natsir.

Setelah tamat dari AMS pada 1930, Natsir sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke *Rechts Hogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke *Handels Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda, karena nilai-nilai akhir yang diraihnya sangat baik. Akan tetapi, Natsir mengabaikan kesempatan emas itu. Dia lebih memilih menjadi guru agama dan jurnalis, di samping meneruskan kajian keagamaannya dengan Ustad Ahmad Hassan. Natsir memberikan pelajaran agama di beberapa sekolah menengah, seperti sekolah MULO *Javastraat* di Bandung dan sekolah guru di

Gunung Sahari, Lembang (Yusuf Abdullah, 1978: 18).

Pada 1930, Natsir merintis sebuah sekolah di Bandung dan menamainya dengan "Pendidikan Islam" (Pendis). Dia tidak berhenti sampai di situ. Untuk memperdalam ilmu pendidikan dan wawasannya, Natsir mengikuti kursus guru diploma sejak pertengahan 1931. Kursus itu berhasil ditamatkannya hanya dalam satu tahun dengan memperoleh ijazah *Lager Onderwijs (LO)*. Sebagai hasil dari kursus itu, Natsir berhasil menyusun rumusan atau rencana "Pendidikan Islam" untuk sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekolah guru. Sekolah "Pendidikan Islam" yang dibinanya terdiri dari empat tingkatan: Taman Kanak-Kanak (*Frobelschool*), HIS, MULO, dan Sekolah Guru (*Kweekschool*). Sekolah itu terus berlangsung dan Natsir menjadi direktornya sampai Jepang datang dan menutup semua sekolah partikelir, termasuk Pendis (Mohtar Naim, 1995: 1).

Hal yang mendorong Natsir terjun ke lapangan pendidikan adalah keinginannya membangun satu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan hakikat ajaran Islam (Yusuf Abdullah, 1978: 34). Hal itu muncul setelah dia melihat akibat dari sistem pendidikan tradisional dalam pesantren dan madrasah yang tidak dapat memenuhi hajat atau keinginan masyarakat.

Pendidikan Islam, menurut Natsir, ditujukan untuk membentuk manusia yang seimbang. Seimbang kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Seimbang pula ketajaman akalinya dengan kemahiran tangannya untuk bekerja. Manusia yang percaya pada kekuatan sendiri, akan mampu berdiri sendiri dan tidak akan selalu bergantung pada harga ijazah untuk "makan gaji" sebagai pegawai. Bagi Natsir, pendidikan adalah bagian yang integral dari kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah proses pendidikan sepanjang hayat. Natsir melihat bahwa pendidikan harus dikembalikan kepada dasar dan tujuan semula diciptakannya manusia di muka bumi ini oleh Allah SWT. Antara dasar dan tujuan pendidikan dengan dasar dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi haruslah identik dan sejalan. Dasar dan tujuannya tidak lain adalah untuk mengabdikan kepada Allah WST semata (QS Al-Dzariyat (51): 56). "Tujuan pendidikan ialah tujuan hidup," begitu kata Natsir.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

*mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 46)*

Di tengah perjuangan pendidikan itulah, Natsir melamar dan mengajak gadis Noer Nahar untuk membina rumah tangga. Ajakan itu diterimanya dengan baik. Pada 22 Oktober 1934, pernikahan keduanya berlangsung sangat sederhana dengan acara walimah (Hakim, 1993: 254). Sejak itulah keduanya melayarkan bahtera rumah tangga dalam suasana suka dan duka dinamika perjuangan.

Masih berkenaan dengan pendidikan juga, pada Maret 1936 di Bandung, Natsir bersama para pemimpin Persatuan Islam (Persis) mendirikan Pesantren Persis. Ahmad Hassan dipercaya sebagai pemimpin pesantren, sedangkan Natsir menjadi penasehat sekaligus guru (Syafiq A. Mugni, 1994: 69).

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, selain bekerja sebagai guru, Natsir juga menjadi jurnalis. Sebagai jurnalis, dia bekerja sama dengan Hassan menerbitkan majalah *Pembela Islam*. Majalah itu memberikan kesempatan kepada Natsir untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Islam dan pembaharuan. Dalam tulisan-tulisannya, Natsir memakai nama samara *Is* (Noer, 1982: 100). Selain itu, Natsir juga mengirimkan karangan-karangannya ke *Pandji Islam* dan *Pedoman Masyarakat*, dua majalah mingguan Islam terkemuka saat itu yang terbit di Medan. Di sini, Natsir memakai nama samara A. Muchlis (Ensiklopedia, 1990: 210). Tulisan-tulisan Natsir di tiga media Islam itu membuatnya dikenal dan diperhitungkan sebagai tokoh muda yang dapat diharapkan umat Islam Indonesia pada masa mendatang.

Natsir mulai berkecimpung dalam bidang politik sejak diminta oleh Sabirin Ketua PSI cabang Bandung, untuk menjadi anggota Partai Sarekat Islam pada 1930. Ketika PSI terpecah belah, Natsir bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) yang didirikan oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo, K.H. Mas Mansur, R. Wiwoho Purbohadidjojo, dan Ki Bagus Hadikusumo pada 1938. Natsir terpilih sebagai ketua PII cabang Bandung sampai masuknya Jepang pada 1942 dan membubarkan semua partai politik yang ada saat itu. Natsir, sebagai tokoh Persis, aktif pula dalam kepemimpinan MIAI. Pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi Masyumi (Noer, 1987: 16).

Pada masa pendudukan Jepang, Natsir diangkat sebagai Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung (Bandung Syiakusy) pada

1942-1945 (Dewan Redaksi, 1993: 21). Salah satu yang diurus oleh biro pendidikan yang dipimpin oleh Natsir itu adalah urusan pemuda. Organisasi pemuda yang bernama Seinendan itu dipimpin oleh Abdul Haris Nasution (Hakim, 1993: 105). Selain para pemuda, juga melatih kemiliteran bagi ulama dan pemuda Muslim. Natsir memayungi gerakan para pemuda dan ulama itu yang secara diam-diam mulai menyusun dan melatih kekuatan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Natsir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bahkan dia kemudian terpilih sebagai anggota badan Pekerja (BP-KNIP) dan kemudian menjadi wakil ketua badan itu (Noer, 1993: 23). Dalam sidang pembentukan Badan Pekerja (BP-KNIP) pada 25 November 1945, Natsir ditunjuk sebagai anggota. Natsir menjadi anggota BP-KNIP sampai diangkat menjadi Menteri Penerangan RI.

Waktu Belanda mengadakan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Natsir termasuk orang-orang yang ditahan oleh Belanda. Penahanan para pemimpin RI di Pulau Bangka itu berakhir dengan dipulihkannya kedaulatan RI atas dasar Perjanjian Roem-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Berdasarkan perjanjian itu, para pemimpin RI yang ditahan dikembalikan ke Yogyakarta (Abdullah, 1978: 85). Akan tetapi, perjanjian itu membuat kecewa PDRI pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara karena merasa dilangkahi dan tidak dihubungi sebelumnya. Tetapi akhirnya, Natsir berhasil meyakinkan pemimpin PDRI untuk mendukung NKRI dibawah Soekarno (A. Hasyimi, 1985: 383).

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Natsir menjadi anggota Parlemen (DPR) RIS dan menjadi Ketua Fraksi Masyumi (Noer, 1988: 106). Sewaktu menjadi anggota Parlemen itulah, salah satu prestasi kenegaraannya terjadi. Natsir menganggap bahwa bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian sebagai hal yang membahayakan keutuhan Republik. Melihat gejala disintegrasi itu, Natsir mengajukan mosi di hadapan sidang DPR-RI pada 3 April 1950, agar seluruh wilayah Indonesia dikembalikan ke bentuk negara kesatuan. Mosi itu terkenal dengan nama Mosi Integral Natsir. (Saefudin, 1983: 110). Tatkala RI dinyatakan kembali sebagai Negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, Bung karno menunjuk Natsir sebagai Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan RI karena

terkesan oleh pandangan jauh dan strategi Natsir melalui mosi integralnya (Saidi, 1981, 35). Sejarah juga mencatat bahwa Natsir adalah pelopor pembentukan Zaken Kabinet, yakni kabinet yang para menternya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan atas partainya (Malik, 1978: 218). Kabinet Natsir memerintah selama 233 hari. Meskipun hanya memegang kekuasaan relatif singkat, Kabinet Natsir mampu melaksanakan tugas dengan baik disamping ada kegagalan-kegagalan.

Setelah itu, Natsir masuk kembali ke partai Masyumi. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, Natsir menjadi anggota Konstituante RI dan sekaligus Ketua Fraksi Masyumi (Basuit, 1972: 434). Dalam masa itulah, dia tampil sebagai juru bicara Islam di konstituante. Sebuah peranan strategis yang sampai kini masih terus diperdebatkan orang, terutama berkaitan dengan sikapnya terhadap Pancasila. Ketika itu, yang paling alot dibicarakan di konstituante adalah masalah dasar negara (Harjono, 1993: 10). Disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan anggota-anggota konstituante dalam memutuskan dasar Negara itu, akhirnya Presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945 dan pembubaran konstituante. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berarti Pancasila kembali menjadi dasar Negara Indonesia.

Waktu konstituante dibubarkan, Natsir sudah tidak berada di tengah para anggota majelis yang terhormat itu. Oleh situasi yang semakin panas dan mengancam keselamatan pribadi dan keluarganya, sejak akhir 1957, dia hijrah ke Sumatra. Tanpa berkompromi terlebih dahulu, ternyata beberapa tokoh yang mengalami nasib yang sama dari Partai Masyumi, sosialis, dan Kristen telah berada pula di Sumatra. Di sanalah kemudian mereka bergabung dan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang menuntut agar Presiden Soekarno mematuhi UUD 1945 (Saefudin dan Rais, 1988: 155). Setelah kekuatan militer PRRI lumpuh, Soekarno menahan pimpinan PRRI, termasuk Natsir.

Penahanan Natsir bukan disebabkan oleh keterlibatan di PRRI, melainkan karena ia dipandang membahayakan politik Soekarno. Natsir ditahan awalnya di dekat Batu Malang dan terakhir di Wisma Keagungan Jakarta. Setelah ditahan sekitar 5 tahun, akhirnya Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 menyusul

kegagalan G 30 S/PKI dan kejatuhan orde lama (Busyari, 1989: 176). Sekeluanya dari tahanan, Pemerintah Soeharto menutup pintu bagi Natsir dan kawan-kawannya separtai di Masyumi untuk aktif kembali di panggung politik. Maka Natsir kembali ke bidang dakwah. Bersama teman-teman seperjuangannya bekas Partai Masyumi, Natsir mendirikan yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta pada 26 Februari 1967 (Hakim, 1993: 235).

Sejak itu, Natsir kian berkibar bahkan ke dunia internasional, terutama Dunia Islam. Banyak sekali permintaan kepadanya untuk menghadiri konferensi, seminar, dan muktamar (Harjono, 1993: 10). Sebenarnya pengenalan langsung Natsir dengan dunia Islam dan tokoh-tokohnya bermula dari kunjungannya ke negara-negara Islam : Pakistan, Irak, Iran, Lebanon, Mesir, turki, dan Arab saudi, serta India, dan Birma. Di Negara-negara tersebut, Natsir diterima bagaikan tamu Negara walaupun dia bukan lagi pejabat Negara. Dia juga bertemu dengan kepala Negara/pemerintahan dan tokoh-tokoh Islam di negara-negara yang dia kunjungi.

Pada puncaknya, Mohammad Natsir mendapat penghargaan *Jaizat Al-malik Faisal Al-'Alamiyat (The Internasional King Faisal Award)* dari Lembaga Hadiah Internasional Malik Faisal yang berkedudukan di Riyadh pada 1980, bersama Syaikh Hasan Al-Nadwi, seorang ulama besar dari Lucknow, India, atas pengabdian dan pengkhidmatan keduanya kepada Islam dan umatnya (Dewan Redaksi, 1993: 22).

Akhirnya, takdir Allah SWT. datang juga. Sabtu 6 februari 1993/14 Sya'ban 1413 pukul 12.10 WIB, Sang Maha Pencipta memanggil hamba-Nya, Dr. Mohammad Natsir. Mohammad Natsir merupakan generasi Angkatan 1928 yang juga termasuk generasi Angkatan 1945. Dia telah mengabdikan sebagian besar dari hidupnya yang 85 tahun, suatu usia yang terbilang istimewa, untuk kepentingan bangsa Indonesia dan umat Islam (Hakim, 1993: 44).

### **Latar Belakang Pemikiran Mohammad Natsir**

Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan:

*أَنْظُرْ مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ*

*Artinya: lihatlah apa yang seseorang katakana dan jangan melihat siapa yang mengatakannya.*



Dalam hal kebenaran memang demikian, dari siapapun harus kita terima, walaupun keluarnya dari orang yang usinya lebih muda atau teman sebaya, Sebaliknya, walaupun dari ulama, kyai, dosen kalau tidak benar jangan diterima. Tetapi dalam konteks kajian pemikiran seseorang, maka ungkapan Imam Ali di atas tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Ungkapan yang tepat untuk mengkaji pemikiran seseorang adalah:

أَنْظُرْ مَا قَالٍ وَأَنْتَظِرْ مَنْ قَالٍ

*Artinya: lihatlah apa yang seseorang katakana dan lihat juga siapa yang mengatakannya.*

Kalau ungkapan Imam Ali diatas, kita tidak perlu meneliti siapa orang yang berbicara, asal ucapannya benar, kita mesti menerima. Tetapi menurut ungkapan kedua ini, disamping kita melihat, membaca, mendengar pembicaraan, pemikiran atau ide seseorang, kita juga harus mengetahui latar belakang orang tersebut. Karena pola piker, pola sikap dan pola tindak seseorang sangat dipengaruhi latar belakangnya (Lidinillah, 2003: 3)

Begitu juga untuk memahami pemikiran Natsir tentang hubungan agama dan Negara, maka kita perlu mengetahui latar belakang kehidupan Natsir seperti yang telah digambarkan dalam biografinya di atas. Disamping biografinya, kita juga harus memahami setting sosial politik ketika Natsir hidup, karena akan sangat mewarnai pemikirannya tersebut. Menurut Dzulfikriddin (2010: 420), ada dua hal yang menjadi latar belakang pemikiran dan aktivitas Natsir, yakni guru-gurunya serta polemik masalah keagamaan dan kebangsaan.

Menurut pengakuan Natsir sendiri, ada tiga orang guru yang mempengaruhi pemikirannya, yaitu Ahmad Hasan (pemimpin Persatuan Islam), Haji Agus Salim dan Syaikh Ahmad Syurkati (pendiri Al-Irsyad) (Memoir, 1993: 82). Ada pula yang menilai Natsir dipengaruhi oleh H.O.S. Cokroaminoto (pemimpin Sarekat Islam) (Fauzan, 1993: 11). Dari keempat tokoh Islam itu, dua orang diantaranya yang paling mempengaruhi pemikiran, sikap hidup dan aktivitas politik Natsir, yakni Ahmad Hasan dan Haji Agus Salim.

Ahmad Hassan yang menurut Dawam Raharjo (1993: 82), beraliran rasional puritan dengan semboyan “ijtihad serta keharusan kembali kepada Ak-Qur’an dan hadis” telah mewariskan pemikiran keislaman “radikal” kepada Natsir, dengan titik berangkat yang ketat

terhadap keharusan upaya penerapan Al-Qur’an dan hadis. Hal itu terlihat dalam perilaku politik Natsir, baik ketika masih aktif di pemerintahan maupun sebagai warga negara biasa, lebih-lebih ketika berpolemik pemikiran dengan Soekarno tentang hubungan agama dan Negara.

Disamping Ahmad Hasan, Haji Agus Salim adalah orang yang banyak mempengaruhi pemikiran sekaligus aktivitas politik Natsir. Agus Salim mendidik Natsir dalam masalah politik dan pergerakan zaman itu. Salah satu yang tampak dari pengaruh Agus Salim terhadap Natsir, menurut Ridwan Saidi (1995: 60) adalah menjauhkan diri dari pembicaraan masalah-masalah yang bersifat Khilafiyah. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisan Natsir yang tidak pernah berbicara tentang masalah yang menjadi ikhtilaf di kalangan umat, bahkan dia berusaha mengajak umat Islam untuk bersatu. Dalam masalah ini, tepat penilaian Ali Yafie bahwa pemikiran Natsir sangat moderat dan terbuka meskipun dia juga dikenal sebagai murid Ahmad Hassan yang mewariskan pemikiran keislaman radikal. Adapun pengaruh Ahmad Syurkati terhadap pemikiran Natsir adalah pembaharuan pemahaman dan pemikiran ajaran-ajaran Islam (Dzulfikriddin, 2010: 47).

Dengan demikian, Ahmad Hasan berperan dalam menanamkan ruh Islam dan pemahaman keagamaan yang radikal pada diri Natsir. Lalu diwarnai oleh Ahmad Syurkati dengan pembaharuan dalam pemahaman dan pemikiran ajaran Islam. Kemudian dilengkapi oleh Haji Agus Salim dengan sikap moderat untuk mempersatukan umat. Semuanya bersatu pada diri Natsir sehingga membentuk pemikiran dan karakter kepribadiannya sebagai seorang pemimpin umat yang tegas dan konsisten dalam pemikiran dan tindakan yang inovatif serta bersikap moderat.

Hal kedua yang menjadi latar belakang dan landasan bagi pemikiran dan aktivitas politik Mohammad Natsir adalah adanya polemik masalah keagamaan dan kebangsaan pada dekade 1930 sampai 1940-an. Polemik itu berlangsung antara kaum nasionalis yang diwakili Soekarno dan kelompok Islam yang diantaranya Ahmad Hasan, Sirajuddin Abbas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Natsir sendiri (Dzulfikriddin, 2010: 50).

Polemik itu diawali keinginan Soekarno untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan tentang Islam dengan membaca buku-buku Islam. Ketika dibuang Belanda ke Ende di Pulau Flores, Soekarno

berkorespondensi dengan Ahmad Hassan di Bandung seraya minta dikirim berbagai buku agama (Hadikusumo, 1983: 9). Akan tetapi, Soekarno tidak hanya sekedar minta dikirim buku oleh Ahmad Hassan tetapi juga dalam surat-suratnya menggoreskan pemikiran dan kritik-kritiknya terhadap umat Islam Indonesia. Atas izin Soekarno, Ahmad Hassan kemudian menerbitkan surat-surat Soekarno itu dalam bentuk buku dengan judul *Surat-Surat Islam dari Endeh*. Selanjutnya Soekarno melanjutkan kritik dan pemikirannya tentang Islam lewat artikel cukup panjang yang dikirimkannya dan dimuat di Majalah Pandji Islam di Medan dan Majalah Pedoman masyarakat antara tahun 1938 sampai 1940-an. Isi tulisan Soekarno antara lain menghantam kekolotan, kebekuan, ketakhayulan, dan kekeramatan. Dalam mengemukakan pendapat dan pemikirannya, Soekarno banyak bercermin pada pembaruan di Turki yang dimotori oleh Mustafa Kemal Attaruk. Sehingga tidak aneh apabila Soekarno juga berpendapat bahwa agama perlu dipisahkan dari Negara.

Tulisan-tulisan Soekarno itu mendapat sanggahan yang gencar dari beberapa tokoh Islam pada waktu itu sehingga menimbulkan polemik hebat. Tokoh-tokoh Islam yang menanggapinya antara lain Ahmad Hassan, Sirajuddin Abbas, TM. Hasbi Ashidieqy dan Mohammad Natsir. Natsir mengirimkan tulisan-tulisannya dari Bandung ke majalah Al-Lisan dan Pandji Islam untuk menanggapi artikel-artikel Soekarno (Dzulfikriddin, 2010: 51).

Ketertarikan Natsir membahas diskursus hubungan agama dan Negara setidaknya dilatarbelakangi oleh adanya polemik di atas, terutama diterbitkannya tulisan-tulisan Soekarno yang lebih berpaham sekularisme, yakni pemisahan agama dan Negara seperti yang dilakukan di Turki. Natsir pun dengan segala pengetahuan keislamannya membantah argumentasi Soekarno sambil memberikan argumentasi tentang keharusan kesatuan agama (Islam) dan negara.

### **Pemikiran Mohammad Natsir tentang Hubungan Agama dan Negara**

Untuk lebih memahami pemikiran Natsir tentang hubungan agama dan Negara ini, terlebih dahulu akan dipaparkan pemikiran Soekarno tentang hal yang sama, karena tulisan-tulisan Natsir tentang agama dan Negara ini merupakan bantahan (*counter*) terhadap tulisan-tulisan Soekarno.

Polemik terbuka mengenai dasar negara ini dimulai pada tahun 1940, yakni ketika terjadi polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir mengenai hubungan antara negara dengan agama. Soekarno berpendirian bahwa demi kemajuan negara maupun agama itu sendiri maka negara dan agama harus dipisahkan, sedangkan Natsir berpendirian sebaliknya bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu; artinya agama harus diurus oleh Negara, sedangkan Negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama (Mahfud MD, 1993: 5).

Pikiran-pikiran yang diwakili oleh Soekarno dan para pendukungnya yang menyebutkan diri mereka sebagai kaum nasionalis ini di zaman perjuangan kemerdekaan menjadikan kecintaan kepada bangsa dan tanah air sebagai titik tolak perjuangannya (Noer, 1986: 5). Sedangkan kelompok Natsir yang dikenal sebagai modernis Islam dengan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air yang tidak kurang dari kaum nasionalis itu mempunyai pendirian bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dan telah mengatur segala sesuatu termasuk mengatur negara.

Sebenarnya polemik tentang hubungan antara agama dan Negara itu merupakan kelanjutan dari polemik antara kedua pihak yang pernah terjadi pada tahun 1918 ketika Komite untuk kebangsaan Jawa (*Comite Voor het Javanche Nasionalisme*) mengecam kalangan Sarekat Islam dengan menandakan bahwa politik dan agama haruslah dipisahkan, sedangkan Sarekat Islam menolaknya dengan mengatakan bahwa gerakan mereka adalah Islam Nasionalis.

Adapun komite untuk kebangsaan Jawa lahir karena peristiwa Jawi Hisworo yakni ketika pada tahun 1916 koran berbahasa Jawa *Jawi Hisworo* menghina Nabi dengan mengatakannya sebagai pemabok dan pematat, satu sikap yang kemudian membangkitkan ummat Islam untuk mengadakan pembelaan. Untuk menandingi kebangkitan ummat Islam itu pendukung sikap Jawi Hisworo membentuk pula *Comite Voor het Javanche Nasionalisme* (Panitia Kebangsaan Jawa). Komite ini menyatakan bahwa pembelaan ummat Islam itu merupakan gerakan asing yang hendak menekan kepercayaan-kepercayaan Jawa. Padahal menurut mereka orang Jawa berbeda dengan orang-orang lain di Nusantara ini karena mempunyai kebudayaan sendiri yang mendekatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi polemik mengenai



hubungan Negara dengan agama sudah tumbuh benihnya paling tidak sejak tahun 1916/1918.

Picu polemik yang secara langsung berbicara tentang hubungan antara Negara dan agama, seperti telah dikemukakan, ditarik oleh Soekarno melalui majalah *Pandji Islam* pada 1940. Di dalam majalah tersebut Soekarno menulis artikel panjang dibawah judul; *“Memudahkan Pengertian Islam”* yang merupakan tanggapan terhadap artikel di dalam majalah *Adil dan Pandji Islam* mengenai *“Memperhatikan gerakan Pemuda”* yang ditulis oleh KHM Mansur. Artikel Soekarno tersebut (Soekarno, 1965: 370) secara lugas mengkritik kekolutan Islam sehingga memerlukan koreksi-koreksi terhadap berbagai pengertiannya.

Esensi artikel Soekarno ini sebenarnya merupakan gugahan bagi umat Islam Indonesia untuk tidak terlalu bertaqlid secara fanatik. Ia mengajak untuk berpikir kembali tentang sejauh mana kebenaran pengertian kita tentang Islam dan menyesuaikan dengan berbagai kultur. Di dalam artikel itu pula Soekarno mulai menyinggung mengenai hubungan antara Negara dan agama dengan penekanan sikapnya bahwa negara dan agama harus dipisahkan demi kebaikan bagi keduanya. Hal itu dikemukakan oleh Soekarno ketika mengajak umat Islam melihat beberapa pusat pemikiran Islam di berbagai negara yaitu Turki, Mesir, Palestina, India, dan Arabia. Ketika mencontohkan Turki, Soekarno kagum pada sikap negara tersebut di bawah pimpinan Kemal Attaturk pada 1928, menghapus ketentuan konstitusinya tentang kedudukan Islam sebagai agama negara dan menjadikan masalah agama sebagai urusan perorangan. Menurut Soekarno dengan penghapusan itu bukan berarti bahwa Islam dihapuskan oleh Turki, melainkan diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri dan tidak kepada Negara. Dan karena itu maka merupakan kesalahan jika dengan sikapnya itu lalu kita menyatakan Turki adalah anti agama, anti Islam, atau menyamakjannya dengan Rusia (Soekarno, 1965: 377). Dikutip pendapat Franches Woodsmall, bahwa Turki modern adalah anti kolot, anti gereja, tetapi tidak anti agama. Dan dikutip pula pernyataan Halide adib Hanoum, bahwa jika Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukankah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi justru karena diurus oleh pemerintah, ummat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politik pemerintah itu. Hal ini

adalah satu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki.

Tetapi sorotan Soekarno yang bersemangat terhadap Turki mendapat tanggapan di antaranya dari sahabatnya di Jakarta yang memintanya menulis lagi. Maka ditulisnya artikel bersambung lagi melalui *Pandji Islam* dengan judul *“Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara”*. Di dalam artikelnya ini Soekarno kembali menunjukkan kecenderungannya pada sikap mendukung tindakan Turki yang telah dengan berani memisahkan agama dari negara, kendati di dalam artikel itu pula soekarno mengatakan *“kita tidak berhak menilai apakah tindakan Kemal attaurk itu benar atau salah, baik atau buruk.”* Benar atau salahnya ia punya perbuatan baik itu bagi Islam, itu sebenarnya bukan kitalah yang dapat menjadi hakim. Yang dapat menjadi hakim baginya hanyalah sejarah kelak kemudian hari”. Demikian Soekarno mengemukakan berkali-kali secara bersamaan dengan ungkapan kekaguman yang berkobar-kobar pada tindakan Kemal Pasya.

Secara panjang lebar soekarno mengemukakan alasan-alasan yang dianggap membenarkan tindakan sekularisasi di Turki dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli yang telah melakukan penelitian mendalam maupun memaparkan kondisi-kondisi obyektif Turki menjelang sekularisasi itu.

Dikemukakannya perkataan Menteri Kehakiman Mahmud Essad Bey yang mengatakan bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari belenggu pemerintah, agar menjadi subur, sebab manakala agama dipakai buat pemerintah, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum oleh raja-raja, orang-orang dzalim dan orang-orang tangan besi.

Menurut Soekarno memang boleh dikatakan secara adil bahwa tujuan dari tindakan Turki Muda di bawah Kemal Attaturk adalah untuk menyuburkan Islam, minimal menolong Islam dari ikatan-ikatan yang menghambat kesuburannya. Pengikatan Islam dengan Negara telah menyebabkan keduanya, baik Negara maupun Islam, menjadi mundur sebab sering kali negara sulit mengatasi masalah jelek yang timbul dalam masyarakat yang oleh masyarakat dibela secara jumud atas nama agfama yang dianut oleh Negara; dan sebaliknya Islam menjadi terikat pula dengan kebijaksanaan pemerintahan. Pada saat mati hidupnya Turki tergantung pada kekuasaan Negara, maka Kemal tidak mau sesuatu tindakan Negara yang amat

perlu tidak dapat dijalankan oleh karena ulama-ulama atau Syaikhul Islam mengatakan makruh atau haram.

Soekarno tidak melupakan kenyataan, bahwa ada keyakinan ummat Islam bahwa Islam telah mengatur berbagai hal termasuk Negara sehingga agama tidak dapat dipisahkan dari Negara. Tapi menurutnya dalam masalah ini belum ada *ijma'*. Oleh karena itu dengan tegas Soekarno menyatakan Islam di Indonesia tidak menjadi urusan Negara.

Sekularisasi di Turki menurut Soekarno adalah sekularisasi atas praktek Islam, realitas Islam yang telah memundurkan Negara maupun Islam sendiri. Jadi sikap Turki waktu itu bukan memotong ajaran Islam, isi perintah Islam atau teori Islam. Oleh sebab itu tad dapatlah dikatakan bahwa tokoh-tokoh Turki muda telah memusuhi atau bertindak anti Islam, tetapi malah memerdekakannya dari keterikatan pada Negara agar dapat berkembang dengan baik.

Tindakan sekularisasi itu mempunyai alasan-alasannya sendiri baik karena desakan-desakan dalam kancah internasional maupun karena alasan internal Turki sendiri. Secara internasional, waktu itu Turki dituntut untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa dengan kekuatan sendiri secara cepat tanpa boleh memikirkan terlalu lama karena keberatan atau fatwa-fatwa para ulama. Sedangkan secara internal dikemukakan alasan-alasan tradisi kuno, alasan ekonomi dan politik.

Tradisi-tradisi dan anggapan-anggapan kuno tentang Islam telah menyebabkan lemahnya sosial ekonomi rakyat, sebab yang menentukan wujud kehidupan rakyat itu bukanlah ajaran Islam, tetapi tradisi kuno dan anggapan-anggapan Islam yang ternyata hidup lebih dominan dari pada ajaran Islamnya itu sendiri.

Alasan ekonomi yang dikemukakan ialah kartena dalam praktek ummat Islam di Turki tidak mampu menyehatkan perekonomian Turki, malahan melemahkan, mengendorkan dan mengkucar-kacirkannya. Bermacam-macam khurafat dan kekotoran Islam sudah membuat status ekonomi rakyat Turki jatuh ke tingkat yang rendah. Begitu juga karena alasan agama Negara adalah agama Islam, maka berbagai kemalasan dan kebobrokan timbul karena alasan ibadah.

Negara tidak biasa mengambil tindakan atas praktek-praktek Islam yang seperti itu karena peraturan antara agama dengan negara telah memberi peluang pada syekh-syekh Islam

menghalanginya dengan alasan agama Islam adalah agama negara.

Posisi para ulama ini pula yang dapat menentukan kebijaksanaan negara yang menjadi lasan politik sekularisasi oleh Kemal Attaturk. Ulama yang tampil sebagai pemeran penting dalam negara setelah surutnya peranan Sultan dan Khalifah dianggap telah menghilangkan kelaki-lakian Kerajaan Turki Usmaniah. Tampilnya ulama ini sebagai pemeran penting dalam negara tidak lain merupakan warisan budaya Byzantium yang berjaya di sana dan menampilkan persatuan agama dan negara dalam pemerintahannya. Ini berarti bahwa persatuan agama dan negara tidaklah asli dari tradisi Islam melainkan warisan Byzantium yang menjadikan agama Katholik sebagai agama negara, namun setelah Islam melenyapkan Byzantium dan menggantikannya dengan Turki, kebudayaan Byzantium yang menyatukan agama dan Negara tetap dipertahankan. Karena alasan-alasan itulah, menurut Soekarno, Kemal Attaturk melakukan sekularisasi yang maha hebat untuk membangun Turki dari kehancuran.

Tetapi tak dapat disembunyikan bahwa dari gaya dan aksentasi pemaparannya, Soekarno memang terkagum-kagum dan mendukung tindakan Kemal Pasya serta memandang layak untuk diterapkan juga di Indonesia. Oleh sebab itu tak mengherankan jika kalangan Islam condong berpendapat bahwa Soekarno menyetujui langkah-langkah yang dijalankan Kemal dengan sekularisasi di Turki. Apalagi di dalam artikel yang berjudul "*saya kurang dinamis*" Soekarno memperkuat kecondongan ke sekularisasi (Soekarno, 1965: 450).

Karena sangkaan itu maka timbul reaksi dari kalangan muslim yang diwakili Muhammad Natsir yang artikelnya muncul di bawah nama samara A. Muchlis. Namun sebelum kita jelajahi pokok pikiran Natsir dalam membantah Soekarno baiklah kita perhatikan dulu kondisi dan kecenderungan aspirasi Islam di Indonesia waktu itu.

Deliar Noer (1986: 177-178), mengemukakan beberapa sifat Islam di Indonesia dalam zaman sebelum abad ke-20 bahwa pada umumnya diantara bidang-bidang ajaran Islam yang mengambil kedudukan penting adalah fiqh dan tarekat yang paling berkembang. Umumnya juga dalam kedua bidang ini terdapat jumud, kebekuan, dengan mengiakan saja apa yang dikatakan guru tanpa mempersoalkannya apakah sesuai dengan ajaran

Qur`an dan Sunnah sebagai sumber-sumber utama ajaran Islam. Sikap ini berhadapan dengan sikap luar yakni modernisasi yang kemudian dipersoalkan apakah modernisasi itu sesuai dengan Islam atau tidak. Hal ini kemudian melahirkan dua sikap yang merugikan yaitu sikap isolasi diri dari perkembangan kehidupan yang sebenarnya yang acap pula diiringi dengan sikap kebencian akan perkembangan itu sendiri, atau melahirkan sikap menerima begitu saja perkembangan dan modernisasi itu tanpa dasar keyakinan manfaatnya tetapi turut serta karena sikap putus asa atau tak tahu menghalanginya. Pada waktu itu Islam menampakkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Minimal oleh ummat Islam sendiri, Islam disamakan dengan ketentuan yang menunjukkan bangsa Indonesia sehingga istilah pribumi pada umumnya diperuntukkan bagi orang Islam, sedangkan orang-orang Kristen meskipun betul-betul pribumi dianggap sebagai orang asing.
2. Umat Islam berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku yang mencampur-adukkan praktek agamanya dengan takhayul-takhayul atau dengan animisme Hindu dan Budha.
3. Sikap tradisional itu sering mengakibatkan kepatuhan yang membuta karena fiqh dan tarekat yang mereka anut, guru (Syekh atau kiai) dianggap ma`shum. Dalam keadaan ini Islam tampaknya merupakan monopoli kiai atau syekh, dan bahkan merupakan milik penganutnya masing-masing, sehingga fatwa yang keluar dari kiai dianggap sebagai hukum final.
4. Sistem pendidikan dalam kaum tradisional yang telah memberikan kedudukan tinggi kepada guru menitikberatkan pada hafalan dan bukan pengertian atau pemahaman terhadap masalah-masalah yang dipelajari sebab murid tidak berani dan tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Belajar di surau atau pesantren merupakan belajar searah dengan menggunakan kitab-kitab yang dipergunakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dalam keadaan ini dinamika ilmu pengetahuan menjadi tidak tampak.
5. Pesantren atau surau tidak mempunyai organisasi, tidak ada sistem kelas dan tidak ada kurikulum, sehingga kemajuan seorang murid sangat tergantung pada murid itu sendiri. Dan kelanjutan hidup pesantren atau surau sangat pula tergantung pada kiai yang bersangkutan.

6. Kaum tradisional pada umumnya tidak mencampuri masalah politik dan menyerahkan masalah itu kepada golongan adat atau golongan priyayi. Meskipun sikap politik mereka sangat membenci Belanda namun mereka berlaku negative, tidak melakyukan langkah-langkah untuk mengusir Belanda. Meskipun ada (terutama dalam tarekat), tetapi sangat sedikit yang membangun rasa benci para pengikutnya kepada penjajah untuk kemudian menggerakannya menggunakan kekerasan melawan penjajah (Noer, 1986: 180).

Dalam sifat Islam yang seperti itu, kemudian muncul sementara kalangan kaum muslimin yang menggugat keadaan itu. Kekuatan kolonial, penetrasi agama Kristen secara lebih luas dan intensif serta perjuangan ke arah kemajuan di kalangan bangsa-bangsa Asia lainnya telah menjadi penantang munculnya kaum muslimin yang menggugat kekurangan diri sendiri untuk mencari cara mengatasi kelemahan-kelemahan Islam tradisional itu. Mereka pada umumnya menginginkan adanya pembaharuan di kalangan ummat Islam, dan karena itu mereka disebut kaum modernis Islam. Pembaharuan atau modernisasi yang mereka inginkan mempunyai garis pandangan seperti berikut:

1. Ajaran Islam harus dikembalikan kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasul yang merupakan sumber-sumber pokok dari pemikiran dan cita-cita kaum muslimin. Oleh sebab itu pintu ijtihad menurut mereka terbuka dan taqlid hendaknya dihentikan. Ajaran-ajaran ulama berbagai madzhab tetap dapat diterima dengan catatan diberi peluang untuk diperiksa atau dipersoalkan kembali guna dicocokkan kesesuaiannya dengan Qur`an dan sunnah. Mereka berpendapat bahwa Islam mempunyai sifat-sifat yang tidak usang karena perputaran zaman.
2. Lembaga ijtihad yang diperjuangkan oleh kaum modernis ini pada gilirannya mengantarkan kebiasaan untuk menghormati pendapat, bukan menghormati orang (guru, kiyai) seperti yang hidup di kalangan kaum tradisional dalam pengertian bahwa penghormatan pada orang (guru, kiyai) masih ada tetapi tidak diletakkan pada kedudukan yang ma`shum atau selalu benar.
3. Pembicaraan tentang Islam tidak lagi terbatas di surau-surau, mesjid atau pesantren tetapi meluas ke berbagai mass media dan lembaga

pendidikan formal juga member pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh kaum modernis. Melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan baik oleh kaum modernis ini Islam kemudian menjadikannya kekuatan sosial yang berkiprah pada level nasional, bukan lagi lokal.

4. Organisasi kaum modernis ini terbuka untuk menerima cara-cara yang dibawa oleh penjajah maupun misi Kristen dalam pengajaran sepanjang cara-cara itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Oleh sebab itu mereka mengakui manfaat ilmu pengetahuan yang diperkenalkan oleh Belanda pada sekolah-sekolah di Indonesia.
5. Gerakan modernis ini betapapun kecilnya telah berhasil menghambat proses pengasingan orang Indonesia yang berpendidikan Barat dari agama Islam yang dianut oleh nenek moyang mereka. Hambatan atas pengasingan ini dilakukan dengan cara mengadakan studi atau organisasi yang bernafas Islam seperti Jong Islam Leten Bond.
6. Kaum modernis yang semula menitikberatkan perhatiannya dalam hal agama (dalam arti sempit) memperluas perhatiannya ke bidang sosial dan politik yang kemudian melahirkan keyakinan di kalangan muslim tentang persatuan agama dan politik dalam Islam. Dari sini lahir visi bahwa Al-Qur`an dan sunnah bukan hanya berisi ajaran ibadah mahdah tetapi juga mencakup masalah-masalah sosial politik. Dari reaksi baik dan kesadaran seperti itulah kemudian timbul reaksi baik dari pemerintah penjajah maupun dari kalangan orang muslim Indonesia yang netral agama atau nasionalis sekuler (Noer, 1986: 182-184)

Gerakan modernis Islam di Indonesia bermunculan pada dekade kedua dan ketiga abad ke-20 dengan lahirnya Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad yang merupakan gerakan sosial keagamaan serta Sarekat Islam yang sekaligus merupakan gerakan politik. Kembali kepada Islam sejati dengan Al-Qur`an dan Sunnah sebagai dasarnya merupakan saran kontrol dalam pemikiran modernis Islam.

Setelah mengemukakan pokok-pokok ajaran kaum modernis, maka kita kembali pada masalah polemic Soekarno-Natsir mengenai hubungan Negara dan agama yang berpangkal pada sekularisasi di Turki.

Mohammad Natsir yang menanggapi artikel-artikel panjang Soekarno itu adalah eksponen modernitas Islam yang sangat terkemuka di Indonesia. Tulisan Soekarno yang diketahui banyak mengambil sumbernya dari tulisan-tulisan non-muslim itu ditanggapi oleh Natsir/Muchlis dengan tempo, semangat, dan gaya retorik yang tak kalah hangatnya melalui majalah Al-manar dan Pandji Islam (dan dikutip oleh majalah-majalah Islam yang lain) secara bersambung.

Melalui tulisannya yang berjudul "Porsekot" pertama-tama Natsir mengemukakan kecurigaannya bahwa tulisan-tulisan Soekarno tentang sepak terjang Kemal di Turki bukan sekedar laporan atau sekedar "kasi mengerti" sebab dalam kalangan yang dikatakan oleh Soekarno "kaum fiqh yang tidak tahu sejarah" di Indonesia tidak ada yang meributkan Kemal Pasya, tidak ada yang menuduh Kemal kafir dan sebagainya yang mengundang Soekarno untuk membelanya. Tetapi mengapa Soekarno menggebu-gebu padahal di kalangan bangsa Indonesia belum pernah terdengar kritikan terhadap Kemal (Natsir, 1957: 434).

Natsir balik bertanya, bagaimana jika seumpama ada yang mengatakan bahwa ada ijma tentang itu, apakah Soekarno akan menerima faham itu atau sebaliknya menolak dengan memberi alasan lain dengan mengatakan bahwa itu cuma satu ijma, satu *gedachte-traditie* yang harus dilemparkan jauh-jauh. Di sini Natsir menanyakan Soekarno, mengapa untuk menolak persatuan negara dan agama Soekarno bertumpu pada tidak adanya ijma, padahal dia sendiri mengatakan bahwa satu *gedachte-traditie* seperti ijma harus dilemparkan jauh-jauh.

Kemudian dalam artikel berikutnya Natsir melanjutkan persolan ijma ini dengan menanyakan, apakah ada ijma yang menyatakan bahwa agama dan Negara tidak harus bersatu. Oleh karena itu, jika ijma ulama mau dijadikan alasan tentang bersatu atau tidaknya agama dengan negara ini pastilah yang satu bisa mengatakan "agama dan negara harus terpisah" karena tidak ada ijma dan yang lain mengatakan "agama dan negara harus bersatu" karena juga tidak ada ijma.

Natsir tidak menyembunyikan sikapnya yang secara diametral berbeda dengan sikap Soekarno dalam hal ini. Baginya agama dan negara tidak dapat dipisahkan, sebab dalam al-Qur`an surat Adz-Dzariyat: 56, ditegaskan bahwa jin dan manusia tidak diciptakan selain

untuk beribadah, sehingga setiap muslim yang hidup di dunia ini tentulah bercita-cita untuk menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, mencapai kebahagiaan dunia dan kemenangan akhirat yang tidak mungkin dipisahkan oleh seorang muslim idealnya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 46)

Allah telah memberi pengaturan secara lengkap mengenai berbagai masalah yang keseluruhannya mencakup cara kita berhubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Aturan-aturan yang berhubungan antar sesama manusia, antara lain adalah mengenai kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Dan inilah yang disebut sebagai urusan kenegaraan. Dengan demikian Islam tidak dapat lepas dari masalah negara. Dikatakannya bahwa pada umumnya sering dilupakan jika ajaran Islam itu mencakup agama dan Negara, tetapi sering diartikan bahwa Islam itu semata-mata peribadatan. Padahal agama menurut Islam meliputi semua kaidah, hudud-hudud, dan muamalah yang secara garis besar sudah dimuat dalam al-Qur`an dan Sunnah nabi. Dalam kaitan ini betapa pentingnya Negara bagi Islam, sebab al-Qur`an dan Sunnah itu tidak berkaki sendiri untuk menjaga supaya peraturan-peraturannya ditaati oleh manusia. Jadi negara diperlukan agar ajaran-ajaran Islam dapat dilaksanakan di bawah perlindungan negara itu. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan pendapat Ibnu Taimiyah yang terdapat dalam bukunya Qomaruddin Khan ketika mengatakan, "maka agama yang benar wajib punya buku petunjuk dan pedang penolong" (Khan, 1973: 54).

Natsir menyayangkan juga persepsi bahwa jika ada pendapat bahwa agama dan negara harus bersatu lalu yang dilihat adalah Islam yang keliru dalam praktek. Padahal pengertian itu tidak benar, sebab haruslah dibedakan antara ajaran Islam sebagai ide dengan praktek pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal yang dilakukan Kemal di Turki yang dikagumi oleh Soekarno adalah mencampakkan ajaran islam dengan alasan : "Negara Islam" yang hidup dalam praktek tidaklah sesuai dengan ajaran islam. Apa yang hidup dalam kalangan Turki Usmani yang

kemudian menjadi alasan sekularisasi Kemal menurut Natsir bukanlah negara Islam. Sebab suatu negeri yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyatnya, membiarkan kebodohan, menindas rakyat dengan kedok Islam, memakai ibadah sebagai kedok padahal kepala-kepala pemerintahan itu penuh maksiat dan membiarkan khurafat dan takhayul, seperti keadaan pada zaman sultan-sultan Turki, maka pemerintahan semacam itu bukanlah pemerintahan Islam. Memang benar bahwa Usmaniyah Turki di bawah bendera Islam pada waktu itu sangat mundur, begitu juga kondisi sosial ekonomi dan politik dari tindakan Kemal attaurk. Tetapi siapapun tahu bahwa itu bukan lantaran Islamnya, melainkan karena sikap mental oknum-oknum pemerintahannya yang telah melanggar dan tidak peduli lagi pada prinsip-prinsip pemerintahan menurut Islam. Tetapi Kemal dengan gerakan "Turki Muda"nya telah mengalamatkan kesalahan itu terhadap Islam. Itulah yang dapat disimpulkan dari pandangan Natsir melalui artikelnya.

Kalau ada pendapat bahwa agama dan Negara harus bersatu tidaklah tepat menjadikan Turki dibawah Bani Usman yang dzlaim dan bobrok untuk menolak pendapat itu. Sebab pemerintahan yang seperti itu tidaklah bias disebut pemerintahan Islam karena telah kehilangan kemampuannya sebagai alat penjamin "kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan peri kehidupan manusia sendiri maupun sebagai anggota masyarakat".

Memang menurut Natsir bagi kaum muslimin Negara bukanlah tujuan, melainkan sekedar alat untuk menjamin pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Artinya tanpa Negara berbagai aturan-aturan sulit dilaksanakan dengan baik karena tidak ada lembaga yang bias memaksanya. Tidak dikesampingkan pula munculnya pertanyaan mungkinkah Al-Qur`an mengatur Negara? Jawabnya jelas bahwa memang di dalam Al-Qur`an tidak ada petunjuk tentang perencanaan anggaran belanja Negara, tidak ditemukan cara-cara mengatur contingenteeing, tidak ada peraturan valuta dan devisa, tidak ada cara mengatur radio, evakuasi dan penjagaan bahaya udara.

"Tidak! Ini semua tentu tidak ada, dan memang tidak perlu diatur dengan wahyu ilahi yang bersifat kekal. Sebab semua ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan yang selalu bertukar dan beredar



menurut tempat, zaman dan keadaan. Yang diatur oleh Islam adalah dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluanmu selama manusia masih bersifat manusia, baik ia manusia zaman onta ataupun manusia zaman kapal terbang, atau manusia zaman kapal stratusfeer, dan lain-lainnya nanti” (Natsir, 1957: 447).

Ketika membantah Soekarno yang mengatakan bahwa Syeikh Abdul Razik (dari Mesir) pernah mengatakan “Rasulullah hanyalah mendirikan agama saja, tidak mendirikan Negara” Natsir menyatakan bahwa setelah diteliti ternyata Abdul Razik tidak pernah mengatakan seperti itu, malahan ia mengakui bahwa “Sesungguhnya Nabi SAW telah membawakan beberapa kaedah dan hukum yang umum, yang amat banyak berkenaan dengan perikehidupan dan urusan-urusan umat.” (Natsir, 1957: 485).

Memang Syeikh itu mengatakan pula bahwa kalau dikumpulkan aturan-aturan agama yang berkenaan dengan urusan keduniawian maka dalam jumlah semuanya itu hanya sebagian kecil sekali yang perlu untuk satu Negara modern, yakni yang berkenaan dengan dasar undang-undang dan politik. Menurut Natsir hal itu memang benar. Tidak banyak yang ditetapkan wahyu ilahi berkenaan dengan Negara modern, akan tetapi yang sedikit itu justru yang perlu-perlu dan harus ada pada setiap Negara modern ataupun tidak modern untuk menjamin keselamatan Negara dan masyarakat itu sendiri. Masalahnya bukan terketak pada sedikit atau banyaknya, tetapi dalam dijalankan atau tidak.

Natsir kokoh pada pandangannya bahwa Negara dan agama tidak dapat dipisahkan karena amatlah diperlukan untuk menjamin terlaksana baiknya peraturan-peraturan agama seperti shalat, puasa, larangan judi, mabuk dan sebagainya. Dengan kata lain, ajaran Islam yang berkenaan dengan negara modern memang sedikit, tetapi yang sedikit itu amat penting untuk menjamin pelaksanaan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia. Mengenai kemungkina masuknya aturan-aturan Islam melalui parlemen dengan cara memperbanyak wakil Islam di dalamnya sesuai dengan jumlah pemeluk Islam seperti dikatakan Soekarno, Natsir mempersoalkannya. Soalnya, bagaimana jika wakil-wakil Islam di Parlemen adalah seperti Islamnya Kemal Pasya ? Bagaimana

kalau hanya Islam di bibir ? Menurut Natsir, Islam bukan semata-mata tambahan yang harus dimasukan ke dalam negara, tetapi negara diperlukan sebagai alat berlakunya hukum Islam. Apakah dengan demikian Islam menolak demokrasi ? Islam adalah demokratis dengan pengertian bahwa ia anti absolutism dan kesewenang-wenangan (Natsir, 1957: 453).

## PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan agama Islam dengan negara, Natsir menganut paham kesatuan agama dan negara yang merupakan lawan dari sekularisasi. Walaupun tidak ada nash yang secara jelas memerintahkan mendirikan negara Islam, tetapi menurut Natsir untuk melaksanakan hukum Islam perintahnya cukup jelas baik dalam Al-Qur`an maupun hadis. Dalam kerangka melaksanakan hukum Islam itulah, maka negara menjadi sebuah keniscayaan, karena hukum Islam tidak bisa dilaksanakan tanpa bantuan penguasa. Dengan demikian, negara bagi Natsir bukan tujuan, tetapi sebatas alat untuk melaksanakan hukum Islam yang merupakan keharusan bagi setiap penganut Islam sebagai konsekwensi dari keimanannya dan syahadatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar. 2000. *Sepak Terjang KW 9 Abu Toto Menyelengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosuwiryo*. Jakarta: Madani Press
- Anwar Harjono. 1995. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: GIP
- . 1993. “Pokok-Pokok Pikiran Pak Natsir Mendasar”, dalam *Suara Mesjid*, Nonor 221, Februari 1993
- A. Hasyimi. 1985. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Adam Malik. 1978. *Mengabdikan Pada Republik*. Jakarta: Gunung Agung
- Dzulfikriddin. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (1993). *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve



- Damanhuri Zuhri. 1994. "Muhammad Natsir: Pendidik-Pejuang yang Istiqomah" dalam *Harian Republika*, Ahad, 17 Juli 1994
- Deliar Noer. 1988. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- . 1986. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali
- Endin Lidinillah. 1993. *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam FKIP Unigal Ciamis*
- Hatta, Moh. 1982. *Memoir*. Jakarta: Tintamas
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Mochtar Naim. 1995. "Natsir, Mengharmoniskan Timur dan Barat" dalam *Harian Republika*, Selasa, 8 Agustus 1995.
- Qomaruddin Khan. 1973. *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*. Islamabad: Islamic Research Institute
- Ridwan Saidi, 1981. "Hari ini 30 Tahun Yang Lalu" dalam *Panji Masyarakat*, Nomor 314, 10 Pebruari 1981.
- Syafiq A. Mughni. 1994. *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu
- S.U. Basuit. 1972. *Alam Pikiran dan Djedjak Perdjuaan Prawoto Mangkusasmito*. Surabaya: Document
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit
- Yusuf Abdullah Puar. 1978. *Mohammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Antara

